



RENJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH *2025*



(024) 8311174



<https://ppidsetda.jatengprov.go.id>



Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, Agustus 2025

a.n SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

u.b

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI" around the top edge and "SETDA" in the center.

TEMMY PURBOYONO, ST, SH, MM, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 197301061999031010

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	5
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	22
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	22
3.2 Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah	8
Tabel	3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	22
Tabel	3.2 Rumusan Program dan Kegiatan	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 namun masih mempertimbangkan dan mengakomodir beberapa kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Hal ini didasari oleh Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran diperlukan agar dapat lebih optimal dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 sebagai tahun pertama RPJMD 2025-2029 sekaligus merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis daerah, maka perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat dicapai. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut.

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Setda memiliki fungsi: Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah; Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Daerah; serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Fungsi Setda selaku koordinator pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali atas upaya pencapaian target pembangunan daerah. Guna melaksanakan fungsi tersebut diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif mulai dari perencanaan tepat sasaran, penganggaran yang proporsional serta pengendalian dan evaluasi yang efektif.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, berbagai dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional berpengaruh terhadap implementasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2025. Dinamika tersebut antara lain masih berlanjutnya perang di Palestina-Israel, Rusia dan

Ukraina, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan, serta kondisi perubahan iklim yang masih berlanjut dan berdampak pada sektor pangan dan energi.

Kebijakan keuangan pada beberapa negara maju pengetatan keuangan global yang mengakibatkan dinamika ekonomi yang turut berdampak pada perekonomian di dalam negeri. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Selanjutnya, menjadi dasar dilakukannya perubahan perencanaan di tingkat perangkat daerah pada tahun 2025.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, disusun mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Biro-Biro lingkup Setda perlu meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di Jawa Tengah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran APBD Setda Provinsi Jawa Tengah. Perubahan Rencana Kerja Setda Tahun 2025 mendasarkan pada penyesuaian target kinerja serta pendanaannya. Dokumen Perubahan Renja Setda Tahun 2025 ini menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di sembilan biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 perihal Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/000.7.2.5/243 tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis, efektif, dan efisien.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai gambaran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.
3. Sinergi perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

- 2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program renja PD;
- 2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas sembilan Biro, sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan melalui 8 Program, dengan 31 Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama yang terdiri dari 3 indikator program yang secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdapat 3 indikator kegiatan tercapai 100%.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat 3 indikator tercapai 100%.

2. Program Kesejahteraan Rakyat

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 3 indikator program secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terdapat 2 indikator kegiatan tercapai 100%.
- b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdapat 3 indikator kegiatan tercapai 100%.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdapat 3 indikator tercapai 100%.

3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Hukum yang terdiri dari 4 indikator program secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan terdapat 4 indikator kegiatan tercapai 100%.
- b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdapat 2 indikator kegiatan tercapai 100%.

4. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program tersebut terdiri dari 8 indikator program yang diampu/dilaksanakan oleh Biro Perekonomian sebanyak 5 indikator program secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan

indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian terdapat 4 indikator kegiatan tercapai 100%.
- b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD terdapat 5 indikator kegiatan tercapai 100%.

Sedangkan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mengampu 3 indikator program pada Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA sebanyak 7 indikator kegiatan secara keseluruhan mencapai target 100%.

5. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari 3 indikator program secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- b. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- c. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 1 indikator dan tercapai 100%.

6. Program Penataan Organisasi

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Organisasi yang terdiri dari 8 indikator program yang secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdapat 3 indikator kegiatan tercapai 100%.
- b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdapat 5 indikator kegiatan tercapai 100%.

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang terdiri dari 5 indikator program secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdapat 6 indikator kegiatan tercapai 100%.
- b. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdapat 3 indikator kegiatan tercapai 100%.

8. Program Administrasi Umum

Program tersebut dilaksanakan oleh seluruh Biro-biro lingkup Setda yang terdiri dari 12 indikator program secara keseluruhan tercapai terhadap target triwulan I, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.

- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat 2 indikator kegiatan tercapai 100%.
- h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- i. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- j. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.
- k. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 11 indikator kegiatan tercapai 100%.
- l. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 indikator kegiatan tercapai 100%.
- m. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdapat 1 indikator kegiatan tercapai 100%.

Adapun secara rinci Evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renja Setda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan Pertama dan perkiraan capaian sampai akhir Tahun 2025, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra
Sekretariat Daerah s/dTriwulan I Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH										
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH										
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	100		95	25	26,32	25,00
		Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	100		95	25	26,32	25,00
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	100		95	25	26,32	25,00
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan									
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	24	8		8	2	25,00	25,00
	Pelaksanaan Otonomi Daerah									
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	9	3		3	1	33,33	33,33
		Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	100		100	25,00	25,00	25,00
		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100		100	25,00	25,00	25,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah									
		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	100		95	25,00	26,32	25,00
		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	100		100	25,00	25,00	25,00
		Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	100		100	25,00	25,00	25,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT										
		Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	81		83	15,00	18,07	18,52	
		Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	82		84	20,00	23,81	24,39	
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	54		60	10,00	16,67	18,52	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar										
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar										
		Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual										

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM										
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	100		96	14,15	14,74	14,15
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	97	100		97	68,42	70,54	68,42
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	100		97	26,2	27,01	26,20
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	100		96	25,17	26,22	25,17
	Fasilitasi Bantuan Hukum									
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	36	12		12	3	25,00	25,00
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	36	12		12	3	25,00	25,00
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan									
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	36	12		12	3	25,00	25,00
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	36	12		12	3	25,00	25,00
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	36	12		12	3	25,00	25,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	12		12	3	25,00	25,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN									
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	97,33		85	36	42,35	36,99
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	99,3		85	42,37	49,85	42,67
		Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	89,01		87	26,09	29,99	29,31
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam									
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN									
		Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	83	81		82	15	18,29	18,52
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	87	85		86	10	11,63	11,76
		Persentase nilai kemandirian BLUD	%	57	55		56	45	80,36	81,82

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	85	83		84	20	23,81	24,10
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	78		79	19,75	25,00	25,32
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD									
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	6	2		2	1	50,00	50,00
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	6	2		2	1	50,00	50,00
		Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	6	2		2	1	50,00	50,00
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	6	2		2	1	50,00	50,00
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	6	2		2	1	50,00	50,00
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian									
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00
		Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
		Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	92	79,07		91	44,92	49,36	56,81
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	83	81,25		82	22,15	27,01	27,26
		Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	85	80,33		82	42,31	51,60	52,67
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
		Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	12	4		4	1	25,00	25,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	12	4		4	1	25,00	25,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	12	4		4	1	25,00	25,00
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI									
		Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	20	48,57		48,57	13	26,77	26,77
		Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	91,43	85,71		88,57	23	25,97	26,83
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	71,43	64,28		69,05	17,26	25,00	26,85
		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	94	57,7		92	23	25,00	39,86

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	93,88	92		90	22,5	25,00	24,46
		Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	82	61,22		36,59	10	27,33	16,33
		Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	74	66		70	18	25,71	27,27
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	93,86	88,73		91,01	22,75	25,00	25,64
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja									
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	9	4		3	0	0,00	0,00
		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	6	4		2	0	0,00	0,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	6	4		2	0	0,00	0,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	6	4		2	0	0,00	0,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	12	4		2	0	0,00	0,00
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	6	4		2	0	0,00	0,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	3	4		1	0	0,00	0,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	3	4		1	0	0,00	0,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
		Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,85	99,76		98,8	19,3	19,53	19,35	
		Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	96,58		95,5	8,79	9,20	9,10	
		Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	87	85		86	93,12	108,28	109,55	
		Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	99,21		85	0	0,00	0,00	
		Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	100		100	0	0,00	0,00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	24	8		8	2	25,00	25,00	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	24	8		8	2	25,00	25,00	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	24	8		8	2	25,00	25,00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	12	4		4	1	25,00	25,00
		Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	93	93		92	93,29	101,40	100,31
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	6	2		2	0	0,00	0,00
URUSAN XX..										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	36	12		12	3	25,00	25,00
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	36	12		12	3	25,00	25,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									
		Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan									
		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	36	12		12	3	25,00	25,00
	Fasilitasi Keprotokolan									

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	36	12		12	3	25,00	25,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	36	12		12	3	25,00	25,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	36	12		12	3	25,00	25,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	36	12		12	3	25,00	25,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	6	2		2	0	0,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2499	833		833	200	24,01	24,01
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100		100	25	25,00	25,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	100		100	18,5	18,50	18,50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	100		100	12	12,00	12,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	100		100	25	25,00	25,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100		100	25	25,00	25,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100		100	25	25,00	25,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	100		100	25	25,00	25,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100		100	100	100,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	(Renstra PD) Tahun 2024-2026		Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
				Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100		100	20	20,00	20,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	100		100	25	25,00	25,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	100		100	25	25,00	25,00
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	100		100	100	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	100		100	100	100,00	100,00
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	90		90	75	83,33	83,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100		100	35	35,00	35,00

BAB III
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Guna memecahkan permasalahan dan penanganan berbagai isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan rumusan Tujuan Setda Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

Pada Tujuan Pertama dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dengan indikator Indeks Kematangan Kebijakan memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil.

Adapun dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil, ditetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah Setda lingkup Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah Setda lingkup Perekonomian, dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah Setda lingkup Administrasi, Organisasi, dan Pembangunan Daerah.

Sedangkan pada Tujuan Kedua dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah memiliki dua sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Setda, dengan satu Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
 - 1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah Setda, dengan satu Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
 - 2.1. Meningkatnya Manajemen Risiko

Berikut Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Perubahan, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	Target Perubahan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah		Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1	37,1
		Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	90
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	90
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	80
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76,5	76,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,5	82,5
		Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	3



3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran [Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Tahun 2025](#) pada sasaran “Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil”, diwujudkan dan didukung melalui pelaksanaan tujuh Program di delapan Biro-biro lingkup [Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2025](#) yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
2. Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum;
4. Program Perekonomian dan Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
5. Program Pelayanan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan pada Biro Pembangunan Daerah; dan
7. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dan sasaran “Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah” didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setda dilaksanakan oleh sembilan Biro-biro lingkup Setda.

Perubahan penargetan program dan kegiatan dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah serta berdasarkan prinsip efektif, efisien dan akuntabel. Beberapa Target Kinerja mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan indikator:
 - Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan dengan target RKPD-APBD Murni semula 97% menjadi 100%.
 - Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji dengan target RKPD APBD Murni semula 97% menjadi 100%.
 - Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan target RKPD APBD Murni semula 96% menjadi 100%.
 - Persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan target RKPD APBD Murni semula 96% menjadi 100%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan target RKPD-APBD Murni semula 97% menjadi 0% berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT tidak

dilaksanakan kegiatan sosialisasi bidang cukai (target 0/nol)

Adapun rincian rencana kinerja Program dan Kegiatan berikut pagu penganggarnya masing-masing level pada Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2025, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37,1	37,1	37,1	419.633.425.000	419.148.425.000	429.077.791.000			Sekretariat Daerah					
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil										419.633.425.000	419.148.425.000	429.193.026.000			Sekretariat Daerah					
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	80	80	3.820.528.000	3.820.528.000	3.767.893.000								
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								1.780.528.000	1.780.528.000	2.052.204.000								
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	48,57	48,57	48,57	104.660.000	104.660.000	59.333.000								
		4.01.02.1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							104.660.000	104.660.000	59.333.000								
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	3	3	104.660.000	104.660.000	59.333.000								
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						104.660.000	104.660.000	59.333.000								
						Jumlah Facilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	4	4	104.660.000	104.660.000	59.333.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	88,57	88,57	88,57	212.400.000	212.400.000	107.348.000								
		4.01.02.1.01		Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							212.400.000	212.400.000	107.348.000								
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	212.400.000	212.400.000	107.348.000								
		4.01.02.1.01.0002			Facilitasi Penataan						212.400.000	212.400.000	107.348.000								
						Jumlah Facilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	4	212.400.000	212.400.000	107.348.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	69,05	69,05	69,05	240.160.000	240.160.000	132.740.000								
		4.01.02.1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							240.160.000	240.160.000	132.740.000								
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	2	2	240.160.000	240.160.000	132.740.000								
		4.01.02.1.02.0002			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						240.160.000	240.160.000	132.740.000								
						Jumlah laporan hasil movev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	4	4	4	240.160.000	240.160.000	132.740.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	92	92	92	276.640.000	276.640.000	276.640.000								
		4.01.02.1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							276.640.000	276.640.000	276.640.000								
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	2	2	276.640.000	276.640.000	276.640.000								
		4.01.02.1.02.0004			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						276.640.000	276.640.000	276.640.000								
						Jumlah Facilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	8	8	8	212.800.000	276.640.000	161.405.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(17)				
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	90	90	90	212.800.000	212.800.000	121.551.000						
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							212.800.000	212.800.000	121.551.000						
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	1	1	212.800.000	212.800.000	121.551.000						
		4.01.02.1.01.0003			Penataan Analisis Jabatan						212.800.000	212.800.000	121.551.000						
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	4	4	4	212.800.000	212.800.000	121.551.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	36,59	36,59	36,59	196.700.000	196.700.000	137.412.000						
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							196.700.000	196.700.000	137.412.000						
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	2	2	196.700.000	196.700.000	137.412.000						
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						196.700.000	196.700.000	137.412.000						
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	4	4	4	196.700.000	196.700.000	137.412.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	70	70	70	262.352.000	262.352.000	1.047.483.000						
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							262.352.000	262.352.000	1.047.483.000						
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	1	1	1	262.352.000	262.352.000	1.047.483.000						
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						262.352.000	262.352.000	1.047.483.000						
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	3	3	3	167.352.000	167.352.000	1.011.645.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	Laporan	1	1	1	95.000.000	95.000.000	35.838.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	91,01	91,01	91,01	274.816.000	274.816.000	169.697.000						
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							274.816.000	274.816.000	169.697.000						
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	2	2	274.816.000	274.816.000	169.697.000						
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						274.816.000	274.816.000	169.697.000						
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	6	6	6	274.816.000	274.816.000	169.697.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								2.040.000.000	2.040.000.000	1.715.689.000						
						Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,8	98,8	98,8	465.000.000	465.000.000	358.078.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							465.000.000	465.000.000	358.078.000						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	4	4	225.000.000	225.000.000	128.896.000						
		4.01.08.1.01.0001		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD							225.000.000	225.000.000	128.896.000						
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Laporan	12	12	12	225.000.000	225.000.000	128.896.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	4	4	240.000.000	240.000.000	229.182.000						
		4.01.08.1.01.0001		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD							240.000.000	240.000.000	229.182.000						
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemosbud yang bersumber dari APBD	Laporan	12	12	12	240.000.000	240.000.000	229.182.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	95,5	95,5	285.000.000	285.000.000	244.467.000						
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							285.000.000	285.000.000	244.467.000						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	4	4	285.000.000	285.000.000	244.467.000						
		4.01.08.1.01.0002		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN							285.000.000	285.000.000	244.467.000						
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Laporan	4	4	4	285.000.000	285.000.000	244.467.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	86	86	86	467.000.000	467.000.000	448.842.000						
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							467.000.000	467.000.000	448.842.000						
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	4	4	120.000.000	120.000.000	136.753.000						
		4.01.08.1.02.0001		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah							120.000.000	120.000.000	136.753.000						
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	4	4	120.000.000	120.000.000	136.753.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	92	92	92	347.000.000	347.000.000	312.089.000						
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						347.000.000	347.000.000	312.089.000						
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	12	12	347.000.000	347.000.000	312.089.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	85	85	720.000.000	720.000.000	592.231.000						
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							720.000.000	720.000.000	592.231.000						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	8	8	254.309.000	254.309.000	134.779.000						
		4.01.08.1.01.0003		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah							254.309.000	254.309.000	134.779.000						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	9	9	8	254.309.000	254.309.000	134.779.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	8	8	325.691.000	325.691.000	307.616.000						
		4.01.08.1.01.0003		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah							325.691.000	325.691.000	307.616.000						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	8	8	325.691.000	325.691.000	307.616.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	8	8	140.000.000	140.000.000	149.836.000						
		4.01.08.1.01.0003		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah							140.000.000	140.000.000	149.836.000						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	8	8	140.000.000	140.000.000	149.836.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	100	100	103.000.000	103.000.000	72.071.000						
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							103.000.000	103.000.000	72.071.000						
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	2	103.000.000	103.000.000	72.071.000						
		4.01.08.1.02.0003		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah							103.000.000	103.000.000	72.071.000						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	2	103.000.000	103.000.000	72.071.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	408.689.148.000	406.454.148.000	419.428.792.000								
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								3.478.000.000	3.478.000.000	3.246.217.000								
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	95	95	1.005.000.000	1.005.000.000	698.403.000								
		4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan							1.005.000.000	1.005.000.000	698.403.000								
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	8	8	1.005.000.000	1.005.000.000	698.403.000								
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						550.000.000	550.000.000	431.051.000								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	4	4	550.000.000	550.000.000	431.051.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.03.1.01.0002			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						230.000.000	230.000.000	143.071.000								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	4	4	230.000.000	230.000.000	143.071.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.03.1.01.0003			Fasilitasi Penataan Wilayah						225.000.000	225.000.000	124.281.000								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	4	4	225.000.000	225.000.000	124.281.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	95	95	1.330.000.000	1.330.000.000	1.040.001.000								
		4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah							1.330.000.000	1.330.000.000	1.040.001.000								
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	3	3	225.000.000	225.000.000	139.228.000								
		4.01.03.1.02.0002			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						225.000.000	225.000.000	139.228.000								
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	4	4	4	225.000.000	225.000.000	139.228.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	95	95	800.000.000	800.000.000	464.007.000								
		4.01.03.1.02.0001			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						800.000.000	800.000.000	464.007.000								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	45	45	45	800.000.000	800.000.000	464.007.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	305.000.000	305.000.000	436.766.000								
		4.01.03.1.02.0003			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						305.000.000	305.000.000	436.766.000								
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	37	37	305.000.000	305.000.000	436.766.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	95	95	1.143.000.000	1.143.000.000	1.507.813.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(17)						
		4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah							1.143.000.000	1.143.000.000	1.507.813.000								
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	95	95	593.000.000	593.000.000	1.131.875.000								
		4.01.03.1.03.0001			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah						593.000.000	593.000.000	1.131.875.000								
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	Dokumen	10	10	10	463.000.000	463.000.000	374.817.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	6	6	6	130.000.000	130.000.000	757.058.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	95	95	200.000.000	200000000	142.746.000								
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta						200.000.000	200.000.000	142.746.000								
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	Dokumen	4	4	4	100.000.000	100.000.000	76.954.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	4	4	100.000.000	100.000.000	65.792.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi						
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	95	95	350.000.000	350000000	233.192.000								
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						350.000.000	350.000.000	233.192.000								
						Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	4	4	150.000.000	150.000.000	78.093.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi						
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	4	4	100.000.000	100.000.000	67.648.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi						
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	100	100	100.000.000	100.000.000	87.451.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi						
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								402.293.148.000	400.058.148.000	413.371.924.000								
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	83	83	83	643.908.000	643.908.000	365.719.000								
		4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							643.908.000	643.908.000	365.719.000								
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	4	4	200.000.000	200.000.000	110.994.000								
		4.01.04.1.02.0002			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						200.000.000	200.000.000	110.994.000								
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	8	8	8	200.000.000	200.000.000	110.994.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	4	4	200.000.000	200000000	104.180.000								
		4.01.04.1.02.0001			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						200.000.000	200.000.000	104.180.000								
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	8	8	200.000.000	200.000.000	104.180.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(17)				
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	4	4	243.908.000	243908000	150.545.000						
		4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						243.908.000	243.908.000	150.545.000						
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	8	8	8	243.908.000	243.908.000	150.545.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	84	84	84	727.816.000	727.816.000	457.259.000						
		4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar							727.816.000	727.816.000	457.259.000						
						Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	4	4	4	200.000.000	200.000.000	107.473.000						
		4.01.04.1.03.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata							200.000.000	200.000.000	107.473.000						
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	8	8	8	200.000.000	200.000.000	107.473.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	4	4	4	327.816.000	327816000	242.430.000						
		4.01.04.1.03.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							327.816.000	327.816.000	242.430.000						
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	8	8	8	327.816.000	327.816.000	242.430.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	4	4	4	200.000.000	200000000	107.356.000						
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						200.000.000	200.000.000	107.356.000						
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Dokumen	8	8	8	200.000.000	200.000.000	107.356.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	60	60	60	400.921.424.000	398.686.424.000	412.548.946.000						
		4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual							400.921.424.000	398.686.424.000	412.548.946.000						
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	4	4	4	396.380.724.000	394.145.724.000	408.012.167.000						
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						396.380.724.000	394.145.724.000	408.012.167.000						
						Jumlah fasilitas pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Unit	800	800	800	396.380.724.000	394.145.724.000	408.012.167.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4	4	4	4.540.700.000	4.540.700.000	4.536.779.000						
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						4.540.700.000	4.540.700.000	4.536.779.000						
						Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	1	1	2.550.000.000	2.550.000.000	2.120.750.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	8	8	8	1.990.700.000	1.990.700.000	2.416.029.000	OPD Provinsi	OPD Provinsi				
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								2.918.000.000	2.918.000.000	2.810.651.000						
						Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	96	100	1.000.000.000	1.000.000.000	1.250.599.000						
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum							1.000.000.000	1.000.000.000	1.250.599.000						
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	12	12	1.000.000.000	1.000.000.000	1.250.599.000						
		4.01.05.1.02.0001			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						1.000.000.000	1.000.000.000	1.250.599.000						
						Jumlah Fasilitas penanganan Perkara	Perkara	12	12	12	450.000.000	450.000.000	373.419.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	200	340	550.000.000	550.000.000	877.180.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	96	100	236.000.000	236.000.000	229.541.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum							236.000.000	236.000.000	229.541.000						
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	12	12	236.000.000	236.000.000	229.541.000						
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						236.000.000	236.000.000	229.541.000						
						Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM	Dokumen	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	35	35	35	120.000.000	120.000.000	112.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	12	12	12	116.000.000	116.000.000	117.541.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	97	97	100	1.030.000.000	1.030.000.000	788.346.000						
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							1.030.000.000	1.030.000.000	788.346.000						
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	12	12	465.000.000	465.000.000	374.261.000						
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						465.000.000	465.000.000	374.261.000						
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	12	12	276.400.000	276.400.000	224.642.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	12	12	188.600.000	188.600.000	149.619.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	12	12	65.000.000	65.000.000	51.844.000						
		4.01.05.1.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan						65.000.000	65.000.000	51.844.000						
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	12	12	65.000.000	65.000.000	51.844.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	12	12	500.000.000	500.000.000	362.241.000						
		4.01.05.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						500.000.000	500.000.000	362.241.000						
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	12	12	192.000.000	192.000.000	142.684.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Laporan	12	12	12	308.000.000	308.000.000	219.557.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	97	97	100	652.000.000	652.000.000	542.165.000						
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							652.000.000	652.000.000	542.165.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	652.000.000	652.000.000	542.165.000						
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota						652.000.000	652.000.000	542.165.000						
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	115	115	115	215.000.000	215.000.000	176.102.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	120	120	120	218.000.000	218.000.000	202.863.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	120	120	120	219.000.000	219.000.000	163.200.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	90	90	7.123.749.000	8.873.749.000	5.996.341.000						
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDANP EMBANGUNAN								4.775.260.000	6.275.260.000	4.235.260.000						
						Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	85	85	514.086.000	514.086.000	312.748.000						
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							514.086.000	514.086.000	312.748.000						
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	2	2	2	267.043.000	267.043.000	162.719.000						
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						267.043.000	267.043.000	162.719.000						
						Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	4	4	267.043.000	267.043.000	162.719.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	2	2	247.043.000	247.043.000	150.029.000						
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						247.043.000	247.043.000	150.029.000						
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	4	4	247.043.000	247.043.000	150.029.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	85	85	521.683.000	521.683.000	330.555.000						
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							521.683.000	521.683.000	330.555.000						
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	2	2	264.640.000	264.640.000	165.469.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						264.640.000	264.640.000	165.469.000								
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan		4	4	4	264.640.000	264.640.000	165.469.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen		2	2	2	257.043.000	257.043.000	165.086.000								
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						257.043.000	257.043.000	165.086.000								
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan		4	4	4	257.043.000	257.043.000	165.086.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
					Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%		87	87	87	577.043.000	2.077.043.000	1.428.597.000								
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							577.043.000	2.077.043.000	1.428.597.000								
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen		2	2	2	175.000.000	175.000.000	99.972.000								
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						175.000.000	175.000.000	99.972.000								
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan		4	4	4	175.000.000	175.000.000	99.972.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen		2	2	2	180.000.000	180.000.000	123.639.000								
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						180.000.000	180.000.000	123.639.000								
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan		4	4	4	180.000.000	180.000.000	123.639.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
					Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen		2	2	2	222.043.000	1.722.043.000	1.204.986.000								
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						222.043.000	1.722.043.000	1.204.986.000								
					Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan		2	2	2	-	1.500.000.000	1.064.270.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan		4	4	4	222.043.000	222.043.000	140.716.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
					Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%		82	82	82	390.000.000	390.000.000	252.192.000								
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							390.000.000	390.000.000	252.192.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja	
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2	2	2	390.000.000	390.000.000	252.192.000			
		4.01.06.1.03.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						390.000.000	390.000.000	252.192.000			
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	4	4	390.000.000	390.000.000	252.192.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86	86	86	960.000.000	960.000.000	678.682.000			
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							960.000.000	960.000.000	678.682.000			
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	2	2	2	810.000.000	810.000.000	575.679.000			
		4.01.06.1.03.0001			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						810.000.000	810.000.000	575.679.000			
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	4	4	810.000.000	810.000.000	575.679.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	2	2	150.000.000	150.000.000	103.003.000			
		4.01.06.1.03.0003			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan						150.000.000	150.000.000	103.003.000			
						Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Laporan	4	4	4	150.000.000	150.000.000	103.003.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	56	56	50.000.000	50.000.000	35.950.000			
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							50.000.000	50.000.000	35.950.000			
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	2	2	25.000.000	25.000.000	17.540.000			
		4.01.06.1.03.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						25.000.000	25.000.000	17.540.000			
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	2	2	25.000.000	25.000.000	17.540.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	2	2	25.000.000	25.000.000	18.410.000								
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan						25.000.000	25.000.000	18.410.000								
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	2	2	25.000.000	25.000.000	18.410.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	84	84	462.448.000	462.448.000	300.770.000								
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							462.448.000	462.448.000	300.770.000								
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	4	4	220.000.000	220.000.000	144.773.000								
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						220.000.000	220.000.000	144.773.000								
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	Laporan	8	8	8	220.000.000	220.000.000	144.773.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	4	4	242.448.000	242.448.000	155.997.000								
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						242.448.000	242.448.000	155.997.000								
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	Laporan	8	8	8	242.448.000	242.448.000	155.997.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	79	79	1.300.000.000	1.300.000.000	895.766.000								
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							1.300.000.000	1.300.000.000	895.766.000								
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	4	4	315.000.000	315.000.000	407.265.000								
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						315.000.000	315.000.000	407.265.000								
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	Laporan	8	8	8	315.000.000	315.000.000	407.265.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	4	4	4	985.000.000	985.000.000	488.501.000								
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						985.000.000	985.000.000	488.501.000								
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	8	8	8	985.000.000	985.000.000	488.501.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								2.348.489.000	2.598.489.000	1.761.081.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	91	91	91	1.270.335.000	1.270.335.000	801.986.000								
		4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1.270.335.000	1.270.335.000	801.986.000								
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	4	4	1.270.335.000	1.270.335.000	801.986.000								
		4.01.07.1.01.0001			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						262.535.000	262.535.000	220.056.000								
						Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	Laporan	4	4	4	180.475.000	180.475.000	132.017.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	2	2	82.060.000	82.060.000	88.039.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.07.1.01.0002			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						799.800.000	799.800.000	443.046.000								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	Laporan	12	12	12	655.800.000	655.800.000	365.029.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	4	4	144.000.000	144.000.000	78.017.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.07.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						208.000.000	208.000.000	138.884.000								
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	4	4	208.000.000	208.000.000	138.884.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82	82	82	474.434.000	724.434.000	485.247.000								
		4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							474.434.000	724.434.000	485.247.000								
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	4	4	474.434.000	724.434.000	485.247.000								
		4.01.07.1.03.0001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						147.204.000	147.204.000	105.276.000								
						Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	2	2	147.204.000	147.204.000	105.276.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.07.1.03.0002			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						162.210.000	162.210.000	110.216.000								
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	4	4	162.210.000	162.210.000	110.216.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.07.1.03.0003			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						165.020.000	415.020.000	269.755.000								
						Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	4	4	165.020.000	415.020.000	269.755.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82	82	82	603.720.000	603.720.000	473.848.000								
		4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							603.720.000	603.720.000	473.848.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	4	4	603.720.000	603.720.000	473.848.000								
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik						190.230.000	190.230.000	130.282.000								
						Jumlah Laporan fasilitas sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	4	4	4	190.230.000	190.230.000	130.282.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						295.350.000	295.350.000	299.083.000								
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	2	2	295.350.000	295.350.000	299.083.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						118.140.000	118.140.000	44.483.000								
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	4	4	118.140.000	118.140.000	44.483.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah											226.172.646.000	254.802.647.000	260.293.769.000			Sekretariat Daerah					
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76,5	76,5	76,5											
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah										226.172.646.000	254.802.647.000	260.293.769.000			Sekretariat Daerah					
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5	82,5	82,5	225.982.646.000	254.612.647.000	260.129.219.000								
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								225.982.646.000	254.612.647.000	260.129.219.000								
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	6.410.000.000	6.610.000.000	8.536.652.000								
		X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.000.000	50.000.000	38.952.000								
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	50.000.000	50.000.000	38.952.000								
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000	50.000.000	38.952.000								
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	12	12	50.000.000	50.000.000	38.952.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.000.000	30.000.000	21.700.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	12	12	30.000.000	30.000.000	21.700.000								
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000	30.000.000	21.700.000								
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	12	30.000.000	30.000.000	21.700.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							210.000.000	210.000.000	710.000.000								
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	210.000.000	210.000.000	710.000.000								
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						160.000.000	160.000.000	660.000.000								
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	Paket	4	4	4	80.000.000	80.000.000	410.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	4	4	4	80.000.000	80.000.000	250.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						50.000.000	50.000.000	50.000.000								
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	Orang	4	4	4	25.000.000	25.000.000	25.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	Orang	4	4	4	25.000.000	25.000.000	25.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.12		Facilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah							6.120.000.000	6.320.000.000	7.766.000.000								
						Persentase layanan fasilitasi kerumah-tanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	100	100	6.120.000.000	6.320.000.000	7.766.000.000								
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						2.950.000.000	2.950.000.000	3.896.000.000								
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	12	12	12	2.950.000.000	2.950.000.000	3.896.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.770.000.000	1.770.000.000	2.070.000.000								
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	12	12	12	1.770.000.000	1.770.000.000	2.070.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						1.400.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000								
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Paket	12	12	12	1.400.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	445.524.000	445.524.000	394.150.000						
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							445.524.000	445.524.000	394.150.000						
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	445.524.000	445.524.000	394.150.000						
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						370.195.000	370.195.000	318.821.000						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	24	24	24	370.195.000	370.195.000	318.821.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						75.329.000	75.329.000	75.329.000						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	16	16	16	75.329.000	75.329.000	75.329.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	245.740.000	245.740.000	135.353.000						
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							245.740.000	245.740.000	135.353.000						
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	245.740.000	245.740.000	135.353.000						
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						222.300.000	222.300.000	111.913.000						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	12	222.300.000	222.300.000	111.913.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						23.440.000	23.440.000	23.440.000						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	12	23.440.000	23.440.000	23.440.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	100	100	154.092.000	504.092.000	424.518.000						
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	350.000.000	326.480.000						
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	100	100	-	350.000.000	326.480.000						
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						-	350.000.000	326.480.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	Orang	900	900	900	-	350.000.000	326.480.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							154.092.000	154.092.000	98.038.000								
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	100	100	154.092.000	154.092.000	98.038.000								
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						144.000.000	144.000.000	87.946.000								
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	12	12	144.000.000	144.000.000	87.946.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.092.000	10.092.000	10.092.000								
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	12	12	10.092.000	10.092.000	10.092.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	100	100	700.000.000	700.000.000	441.074.000								
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	-	-								
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	100	100	0	-	-	-								
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						-	-	-								
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Orang	8000	8000	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							700.000.000	700.000.000	441.074.000								
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	100	100	700.000.000	700.000.000	441.074.000								
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						660.000.000	660.000.000	401.074.000								
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	12	12	480.000.000	480.000.000	307.040.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	12	12	180.000.000	180.000.000	94.034.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40.000.000	40.000.000	40.000.000								
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	12	12	20.000.000	20.000.000	20.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	12	12	20.000.000	20.000.000	20.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	343.736.000	343.736.000	385.655.000						
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							343.736.000	343.736.000	385.655.000						
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	343.736.000	343.736.000	385.655.000						
		X.XX.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							275.000.000	275.000.000	337.055.000						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	12	275.000.000	275.000.000	337.055.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							68.736.000	68.736.000	48.600.000						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	12	68.736.000	68.736.000	48.600.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	100	820.541.000	820.541.000	554.386.000						
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							145.312.000	145.312.000	100.503.000						
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	100	100	145.312.000	145.312.000	100.503.000						
		X.XX.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							-	-	-						
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	0	0	-	-	-	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							104.574.000	104.574.000	59.765.000						
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	4	4	104.574.000	104.574.000	59.765.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							40.738.000	40.738.000	40.738.000						
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	10	10	40.738.000	40.738.000	40.738.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							675.229.000	675.229.000	453.883.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja	
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	100	675.229.000	675.229.000	453.883.000			
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						634.968.000	634.968.000	413.622.000			
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	12	12	470.000.000	470.000.000	273.176.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	12	12	164.968.000	164.968.000	140.446.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40.261.000	40.261.000	40.261.000			
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	12	12	30.000.000	30.000.000	30.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	12	12	10.261.000	10.261.000	10.261.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	100	100	909.526.000	909.526.000	711.956.000			
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							909.526.000	909.526.000	711.956.000			
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	100	100	909.526.000	909.526.000	711.956.000			
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						872.000.000	872.000.000	675.230.000			
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	12	422.000.000	422.000.000	429.655.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	12	12	450.000.000	450.000.000	245.575.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						37.526.000	37.526.000	36.726.000			
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	12	13.000.000	13.000.000	13.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	12	12	24.526.000	24.526.000	23.726.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja	
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	100	100	307.952.000	307.952.000	162.384.000			
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				307.952.000	307.952.000	162.384.000						
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	100	100	307.952.000	307.952.000	162.384.000			
		X.XX.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				287.952.000	287.952.000	142.191.000						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	12	12	287.952.000	287.952.000	142.191.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000	20.000.000	20.193.000						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	12	12	20.000.000	20.000.000	20.193.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100	18.409.450.000	18.309.450.000	28.602.179.000			
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				195.000.000	195.000.000	113.125.000						
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100	195.000.000	195.000.000	113.125.000			
		X.XX.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				45.000.000	45.000.000	13.125.000						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	12	45.000.000	45.000.000	13.125.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				150.000.000	150.000.000	100.000.000						
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	4	4	150.000.000	150.000.000	100.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				15.334.203.000	15.264.203.000	25.451.984.000						
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	12	12	12	15.334.203.000	15.264.203.000	25.451.984.000			
		X.XX.01.1.13.0001		Penyiapan Materi Pimpinan				350.000.000	350.000.000	373.166.000						
						Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Dokumen	12	12	12	350.000.000	350.000.000	373.166.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.13.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				11.484.203.000	11.449.203.000	21.498.850.000						
						Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	12	12	12	11.484.203.000	11.449.203.000	21.498.850.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.13.0003		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				3.500.000.000	3.465.000.000	3.579.968.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
						Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	12	12	3.500.000.000	3.465.000.000	3.579.968.000						
		X.XX.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan							2.880.247.000	2.850.247.000	3.037.070.000						
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	12	12	12	2.880.247.000	2850247000	3.037.070.000						
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						2.580.247.000	2.550.247.000	2.617.008.000						
						Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	12	12	12	2.580.247.000	2.550.247.000	2.617.008.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						250.000.000	250.000.000	370.062.000						
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	12	12	12	250.000.000	250.000.000	370.062.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						50.000.000	50.000.000	50.000.000						
						Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100	197.236.085.000	225.416.086.000	219.780.912.000						
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							115.305.142.000	117.259.286.000	99.862.359.000						
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	12	115.305.142.000	117.259.286.000	99.862.359.000						
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						113.340.142.000	115.194.286.000	97.829.615.000						
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	113.340.142.000	115.194.286.000	97.829.615.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.540.000.000	1.640.000.000	1.640.000.000						
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	12	1.540.000.000	1.640.000.000	1.640.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						300.000.000	300.000.000	300.000.000						
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	12	12	300.000.000	300.000.000	300.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						125.000.000	125.000.000	92.744.000						
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	12	12	125.000.000	125.000.000	92.744.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH				
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							792.000.000	1.010.436.000	889.757.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	12	12	792.000.000	1.010.436.000	889.757.000								
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						442.000.000	610.436.000	592.679.000								
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	12	12	442.000.000	610.436.000	592.679.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						350.000.000	400.000.000	297.078.000								
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	12	12	350.000.000	400.000.000	297.078.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							30.000.000	30.000.000	20.000.000								
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	12	12	30.000.000	30.000.000	20.000.000								
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						30.000.000	30.000.000	20.000.000								
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	12	12	12	30.000.000	30.000.000	20.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							10.604.954.000	10.004.954.000	13.134.725.000								
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100	10.604.954.000	10.004.954.000	13.134.725.000								
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						400.000.000	400.000.000	408.107.000								
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	400.000.000	400.000.000	408.107.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500.718.000	500.718.000	806.337.000								
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	500.718.000	500.718.000	806.337.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						425.000.000	425.000.000	452.229.000								
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	12	12	425.000.000	425.000.000	452.229.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000	150.000.000	150.000.000								
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	150.000.000	150.000.000	150.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						200.000.000	200.000.000	200.000.000								
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	12	200.000.000	200.000.000	200.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.500.000.000	5.300.000.000	9.088.816.000								
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12	12	5.500.000.000	5.300.000.000	9.088.816.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.429.236.000	3.029.236.000	2.029.236.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	12	12	3.429.236.000	3.029.236.000	2.029.236.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.700.000.000	31.898.064.000	37.732.234.000								
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Paket	2	2	2	10.700.000.000	31.898.064.000	37.732.234.000								
		X.XX.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel							1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000								
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	2	2	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							9.200.000.000	30.398.064.000	36.232.234.000								
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	50	50	50	9.200.000.000	30.398.064.000	36.232.234.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit														
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							25.481.213.000	27.506.213.000	28.488.908.000								
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	12	12	25.481.213.000	27.506.213.000	28.488.908.000								
		X.XX.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000								
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							631.213.000	831.213.000	1.232.763.000								
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12	631.213.000	831.213.000	1.232.763.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							17.350.000.000	19.175.000.000	19.756.145.000								
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12	16.750.000.000	18.575.000.000	18.982.093.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	12	12	200.000.000	200.000.000	198.552.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	2	2	400.000.000	400.000.000	575.500.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8.300.000.000	11.650.000.000	13.482.544.000								
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	833	833	8.300.000.000	11.650.000.000	13.482.544.000								
		X.XX.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							250.000.000	250.000.000	250.000.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah					
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	4	4	250.000.000	250.000.000	250.000.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.250.000.000	2.350.000.000	2.448.107.000								
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	182	182	182	2.250.000.000	2.350.000.000	2.448.107.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
											87.500.000	87.500.000	87.500.000								
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel						87.500.000	87.500.000	87.500.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30	30	30	87.500.000	87.500.000	87.500.000								
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.400.000.000	1.400.000.000	1.366.226.000								
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	300	300	300	1.400.000.000	1.400.000.000	1.366.226.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.000.000.000	7.250.000.000	8.981.404.000								
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	17	17	17	4.000.000.000	7.250.000.000	8.981.404.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						312.500.000	312.500.000	349.307.000								
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	300	300	300	312.500.000	312.500.000	349.307.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							26.022.776.000	26.057.133.000	26.170.385.000								
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100	26.022.776.000	26.057.133.000	26.170.385.000								
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.743.094.000	2.743.094.000	2.743.094.000								
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	2	2	2.743.094.000	2.743.094.000	2.743.094.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						23.279.682.000	23.314.039.000	23.427.291.000								
						Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	2	2	23.279.682.000	23.314.039.000	23.427.291.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH						
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah										190.000.000	190.000.000	164.550.000			Sekretariat Daerah					
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	3	3	190.000.000	190.000.000	164.550.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Satuan	2025						Lokasi		Unit Kerja Perangkat Daerah			
								Target			Pagu			Renja PD	P-Renja		Renja PD	APBD	P-Renja
								Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								190.000.000	190.000.000	164.550.000						
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	90	90	190.000.000	190.000.000	164.550.000						
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							190.000.000	190.000.000	164.550.000						
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	190.000.000	190.000.000	164.550.000						
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						110.000.000	110.000.000	99.004.000						
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Dokumen	4	4	4	110.000.000	110.000.000	99.004.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	Sekretariat Daerah Prov Jateng				
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000	80.000.000	65.546.000						
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Laporan	6	6	6	80.000.000	80.000.000	65.546.000	OPD Provinsi; JAWA TENGAH	Sekretariat Daerah Prov Jateng				

BAB IV PENUTUP

Guna menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan beberapa tahapan, antara lain: Evaluasi kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan hingga triwulan I; Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kinerja berikut dengan alternatif upaya penyelesaiannya; Perumusan langkah penyesuaian baik pada anggaran, target kinerja maupun agenda kegiatan.

Penyesuaian pada sisi kebijakan baik secara nasional maupun regional sangat diperlukan agar dapat mewujudkan keberlanjutan pembangunan. Penyesuaian RKPD 2025 salah satunya adalah pada program/kegiatan sesuai Asta Cita dan Visi Misi Gubernur. Sehingga perlu adanya perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain pada Program/Kegiatan dan target kinerja. Penyesuaian pada beberapa target kinerja diharapkan dapat memperkuat beberapa hal yang akan menjadi daya ungkit terhadap pembangunan Jawa Tengah di tahun 2025. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 juga sebagai baseline RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan RKPD akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dokumen perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya.

Anggaran kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan berdasarkan kebutuhan belanja atas aktivitas agenda yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip efektif dan efisien sebagaimana dinamika peraturan yang berlaku. Adapun inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran.